

Pengaruh Ukuran Perusahaan, Komite Audit, Pertumbuhan Penjualan, dan Kepemilikan Asing Terhadap Penghindaran Pajak dengan Tingkat Implementasi IFRS sebagai Moderasi

Eka Ismiyanti¹⁾, Ahalik²⁾

Akuntansi, Fakultas Bisnis, Institut Teknologi dan Bisnis Kalbis
Jalan Pulomas Selatan Kav. 22, Jakarta 13210

¹⁾ Email: ekaismi92@gmail.com

²⁾ Email: ahalikcpai@gmail.com

Abstract: This study uses a research model to obtain empirical evidence about the effect of company size, audit committee, sales growth, and foreign ownership on tax avoidance with the level of IFRS implementation as a moderating variable. The variables used in this research model are company size, audit committee, sales growth, foreign ownership, tax avoidance, and the level of IFRS implementation. The population of this study is companies registered in the Kompas 100 index in the period 2016 - 2018. Based on sampling using the purposive sampling method, the samples used in this study were 52 companies with a period of 3 (three) years producing 156 total observations. Data analysis was performed with descriptive statistical analysis, and Moderated Regression Analysis (MRA) with SPSS version 25. The results of the study concluded that company size and foreign ownership had no effect on tax avoidance, the audit committee and sales growth had an effect on tax avoidance. The level of IFRS implementation is not able to moderate either the influence of company size, audit committee, sales growth and foreign ownership on tax avoidance.

Keywords: company size, audit committee, sales growth, foreign ownership, tax avoidance, and the level of IFRS implementation

Abstrak: Penelitian ini menggunakan satu model penelitian untuk mendapatkan bukti empiris tentang pengaruh ukuran perusahaan, komite audit, pertumbuhan penjualan, dan kepemilikan asing terhadap penghindaran pajak dengan tingkat implementasi IFRS sebagai variabel moderasi. Variabel yang digunakan dalam model penelitian ini adalah ukuran perusahaan, komite audit, pertumbuhan penjualan, kepemilikan asing, penghindaran pajak, dan tingkat implementasi IFRS. Populasi penelitian ini adalah perusahaan yang terdaftar dalam indek Kompas 100 pada periode 2016 – 2018. Berdasarkan pengambilan sampel dengan metode purposive sampling, sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 52 perusahaan dengan periode 3 (tiga) tahun menghasilkan 156 jumlah observasi. Analisis data dilakukan dengan analisis statistik deskriptif, dan Moderated Regression Analysis (MRA) dengan SPSS versi 25. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa ukuran perusahaan dan kepemilikan asing tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak, komite audit dan pertumbuhan penjualan berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Adapun tingkat implementasi IFRS tidak mampu memoderasi baik pengaruh ukuran perusahaan, komite audit, pertumbuhan penjualan dan kepemilikan asing terhadap penghindaran pajak.

Kata kunci: ukuran perusahaan, komite audit, pertumbuhan penjualan, kepemilikan asing, penghindaran pajak, dan tingkat implementasi IFRS

I. PENDAHULUAN

Fenomena penghindaran pajak masih banyak dilakukan oleh perusahaan untuk

mengecilkan beban pajak yang dibayarkan oleh perusahaan terutama pada perusahaan perusahaan yang terdaftar pada BEI. Dengan banyaknya perusahaan yang

melakukan penghindaran pajak, maka negara akan dirugikan dengan berkurangnya pendapatan negara. Seperti yang dilakukan oleh PT Adaro Energy Tbk merupakan perusahaan pertambangan yang terdapat di Indonesia. PT Adaro diduga telah melakukan penghindaran pajak dengan skema transfer pricing melalui anak perusahaannya yang berada di Singapura. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas DJP yaitu Yoga Saksama menyatakan bahwa dugaan tax avoidance muncul berdasarkan laporan Global Witness itu jadi salah satu masukan untuk memastikan Wajib Pajak (WP) Badan mematuhi ketentuan yang berlaku. LSM Internasional Global Witness yang bergerak di isu lingkungan hidup menerbitkan laporan investigasi dugaan penggelapan pajak perusahaan Adaro Energy. Dalam laporan itu, Adaro diindikasikan melarikan pendapatan dan labanya ke luar negeri sehingga dapat menekan pajak yang dibayarkan kepada Pemerintah Indonesia. Menurut Global Witness, cara ini dilakukan dengan menjual batu bara dengan harga murah ke anak perusahaan Adaro di Singapura, Coaltrade Services International untuk dijual lagi dengan harga tinggi. Melalui perusahaan itu, Global Witness menemukan potensi pembayaran pajak yang lebih rendah dari seharusnya dengan nilai 125 juta dolar AS kepada pemerintah Indonesia. Di samping itu, Global Witness juga menunjuk peran negara suaka pajak yang memungkinkan Adaro mengurangi tagihan pajaknya senilai 14 juta dolar AS per tahun. (www.tirto.id, 2017).

Sumber penerimaan negara Indonesia berasal dari tiga sektor yaitu: pajak, non pajak, dan hibah. Penerimaan terbesar negara Indonesia berasal dari pajak. Realisasi penerimaan pajak baru mencapai Rp 603,34 triliun pada kuartal I-2019 atau tumbuh 3,74 persen dibandingkan periode

yang sama tahun lalu. Meski begitu, pertumbuhan realisasi pajak tersebut mengalami perlambatan sebab pada semester I-2018 penerimaan pajak mampu tumbuh sebesar 13,99 persen. Terdapat enam sektor yang menjadi penyumbang terbesar penerimaan pajak pada semester I-2019.

Keenam sektor itu mengalami kontraksi. Berikut daftar enam sektor penyumbang terbesar dari yang terendah hingga tertinggi. Dirjen pajak mencatat sektor transportasi dan pergudangan menyumbang sebesar Rp 24,54 triliun pada semester I-2019. Realisasi ini tumbuh hingga 23,1 persen, padahal pada periode yang sama tahun lalu, pertumbuhan pajak sektor ini hanya tumbuh 10,7 persen. Salah satu pendorong sektor ini yakni melonjaknya penggunaan gudang, sehingga pembaharuan pajak oleh pengguna gudang meningkat. Sektor pertambangan menyumbang sebesar Rp 33,43 triliun pada semester I-2019. Sayangnya realisasi ini anjlok 14 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu yang tumbuh hingga 80,3 persen. Faktor utama yang menyebabkan kontraksi penerimaan pajak dari sektor pertambangan yakni penurunan sembarangan di pasar global. Sektor Konstruksi dan real estate pada semester I-2019 menyumbang sebesar Rp 36,47 triliun pajak kepada negara atau tumbuh sebesar 3,4 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Meski begitu pertumbuhan penerimaan pajak sektor ini mengalami perlambatan. Sebab pada semester I-2019, pertumbuhan penerimaan pajaknya mencapai 11,5 persen. Sektor jasa keuangan menyumbang pajak sebesar Rp 83,56 triliun. Penerimaan pajak dari sektor ini tumbuh 8,8 persen, lebih besar dibandingkan periode yang sama tahun lalu yang hanya tumbuh 4,8 persen. Sektor perdagangan menyumbang sebesar Rp

114,37 triliun pada semester I-2019. Pertumbuhannya hanya 2,5 persen, lebih kecil dari semester I-2018 yang tumbuh 27,6 persen. Melambatnya pertumbuhan ini dipengaruhi oleh pembayaran restitusi yang tumbuh sebesar 41,3 persen dan anjaknya PPN impor 6,7 persen. Sektor industri pengolahan menjadi sektor penyumbang pajak terbesar pada semester I-2019 sebesar Rp 160,62 triliun. Namun realisasi ini turun 2,6 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Pada semester I-2019, realisasi penerimaan pajak sektor pengolahan mampu tumbuh sebesar 13 persen. Anjaknya penerimaan pajak dari sektor pengolahan disebabkan oleh tingginya restitusi yang tumbuh sebesar 30,8 persen dan moderasi aktivitas impor yang menekan PPN hingga minus 6,2 persen. (<https://money.kompas.com>, 2019).

Di Indonesia terdapat beberapa kategori ukuran perusahaan yaitu usaha kecil, menengah, dan besar. Ukuran perusahaan dapat mencerminkan potensi laba yang dihasilkan perusahaan dimasa yang akan datang. Wakil Presiden, Muhammad Jusuf Kalla (JK), mengatakan perkembangan teknologi telah mengubah dunia usaha dan menciptakan revolusi entrepreneurship. Sekarang perusahaan tidak lagi berfokus hanya kepada mencari keuntungan tetapi valuasi. Artinya saat ini ukuran perusahaan bukan lagi tentang keuntungan dan aset, tetapi saat ini valuasi perusahaan lebih penting. Valuasi merupakan nilai ekonomis dari sebuah perusahaan. Hal ini tentunya tidak lepas dari peran teknologi yang semakin berkembang, serta sistem yang makin mempermudah perusahaan untuk menjalankan usahanya. Berkembangnya teknologi membuat para manager dengan mudah mengontrol perusahaan dari mana saja, tidak harus datang langsung ke

perusahaan.
(www.cnbcindonesia.com,2019).

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 55/POJK.04/2015 pasal 4 yang berisi komite audit paling sedikit terdiri dari tiga orang anggota yang berasal dari komisaris independen dan dari pihak luar emiten atau perusahaan publik. Komite audit adalah komite yang dibentuk oleh dewan komisaris untuk melakukan tugas pengawasan pengelolaan perusahaan. Anggota komite audit diangkat dan diberhentikan oleh dewan komisaris. Komite audit juga bertanggung jawab terhadap pengawasan proses pelaporan keuangan. Selain itu komite audit merupakan penghubung antara pemegang saham dan dewan komisaris dengan pihak manajemen dalam menangani masalah pengendalian. Masa tugas anggota komite audit tidak boleh lebih lama dari masa jabatan dewan komisaris sebagaimana diatur dalam anggaran dasar dan dapat dipilih hanya untuk satu periode berikutnya.

Penjualan memiliki pengaruh terhadap perusahaan. Pertumbuhan penjualan menunjukkan perkembangan tingkat penjualan dari tahun ke tahun. Pertumbuhan penjualan dapat dijadikan acuan perusahaan untuk mengoptimalkan penjualan tahun selanjutnya dengan melihat penjualan yang terjadi pada tahun sebelumnya, serta dapat memprediksi profit yang akan diperoleh dari suatu penjualan. Jika pertumbuhan penjualan meningkat, maka laba perusahaan akan meningkat menyebabkan laba akan meningkat sehingga beban pajak perusahaan akan tinggi. Jika beban pajak perusahaan tinggi cenderung membuat manajemen untuk melakukan penghematan pajak dengan cara penghindaran pajak. Sebaliknya jika pertumbuhan penjualan menurun, maka

laba perusahaan akan menurun. Sehingga pertumbuhan penjualan dapat menggambarkan baik atau buruknya tingkat penjualan pada sebuah perusahaan.

Kepemilikan asing umumnya dilakukan oleh warga negara asing yang memilih untuk menanamkan modalnya di perusahaan yang berada di Republik Indonesia. Semakin tinggi kepemilikan asing menunjukkan bahwa kinerja perusahaan tersebut baik, sehingga menarik minat investor asing untuk menanamkan modalnya di perusahaan tersebut. Semakin besar jumlah kepemilikan saham pada perusahaan tersebut, maka kendali atas pengelolaan perusahaan semakin besar. Investor asing masih mendominasi kepemilikan ekuitas di pasar modal Indonesia. Namun, porsinya kian menciut oleh meningkatkan peran investor domestik. Berdasarkan nilai efek yang tersimpan di Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), per 9 Agustus 2019, investor asing menggenggam sebesar Rp1.907 triliun setara 51,46 persen dari total ekuitas. Sementara, porsi investor domestik tercatat Rp1.799 triliun atau setara 48,54 persen. Direktur KSEI Alec Syafrudin mengatakan meski masih dominan, porsi asing turun dibandingkan posisi akhir tahun 2018. Pada 28 Desember 2018 lalu, asing terpantau menggenggam Rp1.857 triliun setara 52,17 persen ekuitas. Sementara domestik mengempit Rp1.703 triliun, setara 47,83 persen. (www.cnnindonesia.com, 2019). Salah satu faktor manajemen memanipulasi laporan keuangan adalah kesulitan keuangan yang dialami oleh perusahaan sehingga manajemen melakukan pelanggaran standar pelaporan keuangan akuntansi. Salah satu standar pelaporan keuangan akuntansi adalah International Financial Reporting Standards (IFRS) yaitu sebagai sarana untuk menyederhanakan laporan keuangan

sehingga laporan keuangan mudah dipahami dan laporan keuangan dapat digunakan secara internasional sehingga menghasilkan laporan keuangan yang transparan dan terbebas dari kesalahan. Indonesia memutuskan untuk mulai mengadopsi IFRS ke dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) pada tahun 2008, namun baru efektif diterapkan pada tahun 2012. Dengan mengadopsi IFRS dapat meningkatkan kualitas informasi akuntansi. IFRS memiliki dampak terhadap kualitas laporan keuangan akuntansi karena manajer akan memiliki lebih sedikit ruang untuk memanipulasi pendapatan.

II. METODE PENELITIAN

A. Tinjauan Pustaka

1. Teori Agensi (*Agency Theory*)

Teori agen dipublikasikan sekitar tahun 1976 dan dicetuskan pertama kali oleh Jensen dan Meckling, menurut Jensen dan Meckling dalam Godfrey (2010, p. 362) *describe an agency relationship as arising where there is a contract under which one party (the principal) engages another party (the agent) to perform some service on the principal's behalf. Under the contract the principal delegates some decision-making authority to the agent. In such a situation, both the principal and the agent are utility maximisers and there is no reason to believe that the agent will always act in the principal's best interest. The agency problem that arises is the problem of including an agent to behave as if he or she were maximising the principal's welfare.* Dalam Bahasa Indonesia di artikan bahwa hubungan keagenan merupakan suatu kontrak dimana satu atau lebih orang (principal) memerintah orang lain (agen) untuk

melakukan suatu jasa atas nama prinsipal serta memberi wewenang kepada agen membuat keputusan yang terbaik bagi prinsipal. Principal akan mempekerjakan agent untuk melakukan pekerjaan yang akan dipakai untuk kepentingan principal, termasuk pemberian kekuasaan perusahaan dari principal ke agent. Jika agent dan principal memiliki tujuan yang sama maka agent akan mendukung apa yang diperintahkan oleh principal. Dalam hal ini agent harus bertindak sesuai dengan kepentingan principal. Terdapat dua macam masalah keagenan atau agency problem yaitu tipe I dan tipe II. Masalah keagenan tipe I adalah masalah keagenan antara pemegang saham dan manajemen. Masalah keagenan tipe II adalah masalah keagenan antara pemegang saham mayoritas dan pemegang saham minoritas.

2. Teori Akuntansi Positif

Teori akuntansi positif menjelaskan sebuah proses dan untuk memprediksi penggunaan kebijakan akuntansi yang paling sesuai dan mengalihkan sewa untuk diri sendiri. Sebelum memutuskan untuk menerapkan IFRS ke dalam PSAK, Indonesia berpedom pada standar akuntansi Amerika General Accepted Accounting Principles (US GAAP). Akan digunakan dimasa yang akan datang. Teori akuntansi positif merupakan pengembangan dari teori normative, teori normatif dianggap tidak memadai untuk akuntansi seiring berkembangnya akuntansi. Menurut (1973) dalam literature akuntansi teori normative sering dinamakan teori apriori, artinya dari sebab ke akibat atau bersifat deduktif. Watts dalam Deegan (2014, p. 206) mengatakan bahwa sejarah munculnya Positive Accounting Theory (PAT) disebabkan oleh perubahan aliran bisnis di AS pada tahun 1950-an dan 1960-an. Watts dan Zimmerman (1986) mengungkapkan terdapat 3 alasan

mendasar terjadinya pergeseran pendekatan normatif ke positif, yaitu:

1. Ketidakmampuan pendekatan normatif dalam menguji teori secara empiris, karena didasarkan pada premis atau asumsi yang salah sehingga tidak dapat diuji keabsahannya secara empiris.

2. Pendekatan normatif lebih banyak berfokus pada kemakmuran investor secara individual dari pada kemakmuran masyarakat luas. 3. Pendekatan normatif tidak mendorong atau memungkinkan terjadinya alokasi sumber daya ekonomi secara optimal di pasar modal. Hal ini mengingat bahwa dalam sistem perekonomian yang didasarkan pada mekanisme pasar, informasi akuntansi dapat menjadi alat pengendali bagi masyarakat dalam mengalokasi sumber daya ekonomi secara efisien.

3. Pajak

Menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 pasal 1 ayat 1 pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pengertian pajak menurut Mr. Dr. NJ. Feldmann dalam buku De Over Heidsmiddelen Van Indonesia (terjemahan): Pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihakoleh dan terutang kepada pengusaha (menurut norma norma yang ditetapkannya secara umum tanpa adanya kontraprestasi, dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran pengeluaran umum. Menurut Dr. Soeparman Soemahamidjaja pajak adalah iuran wajib berupa uang atau barang yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum, guna menutup biaya produksi barang-barang

dan jasa-jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum”. Dari definisi di atas tampak istilah “dipaksakan” karena bertitik tolak pada istilah “iuran wajib”. Sisi lainnya yang berhubungan dengan kontraprestasi menekankan pada mewujudkan kontraprestasi itu diperlukan pajak. Menurut Prof. Dr. Rochmat. Soemitro, S. H p Pajak adalah iuran kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

4. Manajemen Pajak

Manajemen pajak adalah usaha menyeluruh yang dilakukan tax manager dalam suatu perusahaan atau organisasi agar hal-hal yang berhubungan dengan perpajakan dari perusahaan atau organisasi tersebut dapat dikelola dengan baik, efisien, dan ekonomis, sehingga memberi kontribusi bagi perusahaan (Chairil Anwar 2014:13). Menurut Minnick dan Noga (2010:79) tujuan manajemen pajak yaitu: untuk mewujudkan fungsi-fungsi manajemen sehingga efektivitas dan efisiensi pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan dapat tercapai. Manajemen pajak akan memiliki manfaat atau nilai guna yang besar bila perusahaan dapat melaksanakannya sesuai dengan tujuan awal yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, dibutuhkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berkompeten, perangkat kerja yang memadai, prosedur kerja yang tepat waktu, tepat jumlah, dan tepat informasi.

5. Perencanaan Pajak

Pengertian perencanaan pajak yang dikemukakan oleh Chairil Anwar (2013:18) adalah sebagai berikut: perencanaan pajak adalah proses

mengorganisasi usaha wajib pajak orang pribadi maupun badan usaha sedemikian rupa dengan memanfaatkan berbagai celah kemungkinan yang dapat ditempuh oleh perusahaan dalam koridor ketentuan peraturan perpajakan (loopholes), agar perusahaan dapat membayar pajak dalam jumlah minimum. Menurut Suandy (2011:16) pengertian perencanaan pajak adalah langkah awal dalam manajemen pajak. Pada tahap ini dilakukan pengumpulan dan penelitian terhadap peraturan perpajakan agar dapat diseleksi jenis tindakan penghematan pajak yang akan dilakukan. Pada umumnya penekanan perencanaan pajak (tax planning) adalah untuk meminimumkan kewajiban pajak.

6. Penghindaran Pajak

Menurut Brown (2012:1), tax avoidance adalah: “arrangement of a transaction in order to obtain a tax advantage, benefit or reduction in a manner unintended by the tax law”. Menurut Dyreng (2008) penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan merupakan usaha perusahaan untuk mengurangi jumlah beban pajak yang ditanggung oleh perusahaan tanpa melanggar undang-undang yang berlaku. Menurut Pohan (2016:23), tax avoidance merupakan upaya penghindaran pajak yang dilakukan secara legal dan aman bagi wajib pajak karena tidak bertentangan dengan ketentuan perpajakan, di mana metode dan teknik yang digunakan cenderung memanfaatkan kelemahan kelemahan (grey area) yang terdapat dalam undang-undang dan peraturan perpajakan itu sendiri, untuk memperkecil jumlah pajak yang terutang.

7. Ukuran Perusahaan

Menurut Brigham & Houston (2010, p. 4) ukuran perusahaan merupakan ukuran besar kecilnya sebuah perusahaan yang

ditunjukkan atau dinilai oleh total asset, total penjualan, jumlah laba, beban pajak dan lain-lain. Menurut Hartono (2008, p. 14) ukuran perusahaan (*firm size*) adalah sebagai berikut besar kecilnya perusahaan dapat diukur dengan total aktiva/ besar harta perusahaan dengan menggunakan perhitungan nilai logaritma total aktiva. Kemudian ukuran perusahaan menurut.

8. Komite Audit

Menurut Tjager dkk (2003) dalam Hartono dan Nugrahanti (2014, p. 196) komite audit merupakan salah satu komite yang dibentuk oleh dewan komisaris dan bertanggung jawab kepada dewan komisaris dengan tugas dan tanggung jawab utama untuk memastikan prinsip-prinsip *good corporate governance* terutama transparansi dan disclosure diterapkan secara konsisten dan memadai.

Berdasarkan keputusan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menjelaskan bahwa komite audit yang dibentuk oleh dewan komisaris untuk melakukan tugas pengawasan pengelolaan perusahaan. Komite audit juga bertanggung jawab terhadap pengawasan proses pelaporan keuangan. Selain itu komite audit merupakan penghubung antara pemegang saham dan dewan komisaris dengan pihak manajemen dalam menangani masalah pengendalian.

9. Pertumbuhan Penjualan

Penjualan memiliki pengaruh yang strategis terhadap perusahaan, karena penjualan yang dilakukan oleh perusahaan harus didukung dengan harta atau aset, bila penjualan ditingkatkan maka aset pun harus ditambah (Dharma & Ardiana, 2016). Menurut Kesuma (2009:41), pertumbuhan penjualan (*growth of sales*) adalah kenaikan jumlah penjualan dari tahun ke tahun atau dari waktu ke waktu.

Perusahaan yang memiliki tingkat pertumbuhan penjualan yang tinggi akan membutuhkan lebih banyak investasi pada berbagai elemen aset, baik aset tetap maupun aset lancar. Pihak manajemen perlu mempertimbangkan sumber pendanaan yang tepat bagi pembelanjaan aset tersebut.

10. Kepemilikan Asing

Menurut undang-undang no 25 tahun 2007 pasal 1 angka 6 menyatakan kepemilikan asing adalah perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, dan pemerintah asing yang melakukan penanaman modal di wilayah Republik Indonesia (Ramadhan dalam Sissandy, 2014). Kepemilikan asing didalam sebuah perusahaan baik institusi maupun individual dianggap sebagai suatu hal yang penting. Hal ini dikarenakan pembelian saham oleh pihak asing mengindikasikan bahwa perusahaan tersebut mengalami pertumbuhan pendapatan yang stabil sehingga menjadi tolak ukur bagi investor lain untuk ikut berinvestasi (Rakhmardi, 2011). Kepemilikan asing diperusahaan memiliki keuntungan yaitu mempermudah manajemen untuk menentukan harga saham.

11. Tingkat Implementasi IFRS

International Financial Reporting Standard (IFRS) merupakan seperangkat standar akuntansi yang dikembangkan oleh International Accounting Standard Board (IASB) yang menjadi standar global untuk penyusunan laporan keuangan perusahaan publik. Standar Akuntansi Internasional disusun oleh empat organisasi utama dunia yaitu Badan Standar Akuntansi Internasional (IASB), Komisi Masyarakat Eropa (EC), Organisasi Internasional Pasar Modal (IOSOC), dan Federasi Akuntansi Internasional (IFAC).

IFRS memiliki peran yang penting dalam dunia akuntansi, dengan mengadopsi IFRS bisnis dan laporan keuangan perusahaan akan konsisten dengan perusahaan-perusahaan dari berbagai negara. Sehingga akan mengundang investor untuk melakukan penanaman modal di perusahaan. Tujuan IFRS adalah membuat perbandingan internasional semudah mungkin, namun tujuan ini belum berjalan dengan mulus karena Amerika Serikat menggunakan GAAP namun beberapa negara menggunakan standar lain, GAAP yang digunakan oleh Amerika Serikat berbeda dengan GAAP yang digunakan oleh Kanada.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif dimana informasi yang diperoleh, dinyatakan dalam satuan angka. Data sekunder yang digunakan diambil dari laporan keuangan perusahaan yang terdaftar dalam indeks Kompas 100 pada periode 2016 – 2018. Laporan tahunan dapat di-download pada website (www.idx.co.id) ataupun pada website masing-masing perusahaan. Selebihnya data sekunder didapatkan dari penelitian terdahulu yang berasal dari jurnal ilmiah, buku literatur dan data-data lainnya yang membantu sebagai penunjang penelitian. Pemilihan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode purposive sampling yaitu pengambilan sampel penelitian dengan kriteria-kriteria yang telah ditentukan. Kriteria dalam menentukan sampel dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Perusahaan yang terdaftar dalam indeks Kompas 100 periode 2016 – 2018.
2. Perusahaan yang terdaftar dalam indeks Kompas 100 selama 3 (tiga) tahun berturut turut.

3. Perusahaan yang memiliki kepemilikan asing.
4. Perusahaan yang melampirkan kepemilikan asing pada laporan keuangannya.

Penelitian ini menggunakan teknik analisis regresi logistik dengan menggunakan program aplikasi Software Statistical Package for Social Sciences (SPSS) versi 25. Alasan digunakannya teknik analisis regresi logistik, karena variabel bebasnya kombinasi antara metrik dan nominal (non-metrik), maka asumsi-asumsi normalitas multivariat tidak akan terpenuhi, sehingga sebaiknya menggunakan uji statistik logistik regression. Sebelum dilakukan analisis regresi logistik, dilakukan uji deskriptif. Untuk uji hipotesis, digunakan uji koefisien determinasi, uji wald, uji multikolonieritas, uji interaksi (MRA).

Variabel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- **Ukuran Perusahaan**

Dengan rumus sebagai berikut:

$$UKP = \text{Ln}(\text{total aktiva})$$

- **Komite Audit**

Dengan rumus sebagai berikut:

$$KMA = \text{Total Komite Audit}$$

- **Pertumbuhan Penjualan**

Dengan rumus sebagai berikut:

$$= \text{SGR} \frac{\text{Net sales}(t) - \text{net sales}(t-1)}{\text{net sales}(t-1)} \times 100\%$$

- **Kepemilikan Asing**

Dengan rumus sebagai berikut:

$$FOW = \frac{\text{jumlah lembar saham yang dimiliki investor asing}}{\text{jumlah lembar saham yang beredar}} \times 100\%$$

• **Penghindaran Pajak**

Dengan rumus sebagai berikut:

$$CETR = \frac{\text{kas yang dibayarkan untuk pajak}}{\text{laba sebelum pajak}}$$

• **Tingkat Implementasi IFRS**

International Financial Reporting Standard (IFRS) merupakan seperangkat standar akuntansi yang dikembangkan oleh International Accounting Standarda Board (IASB) yang menjadi standar global untuk penyusunan laporan keuangan perusahaan publik. Tingkat implementasi IFRS dihitung dengan mrnggunakan variabel dummy.

Nilai 1	Nilai 0	Tidak dapat diterapkan (N/A)
Untuk perusahaan yang menerapkan PSAK per 1 Januari 2018.	Perusahaan yang belum menerapkan penggunaan PSAK per 1 Januari 2018.	Perusahaan tidak memiliki transaksi yang terkait dengan PSAK yang dimaksud.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Analisis Statistik Deskriptif

Tabel 1 Analisis Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean
CETR	156	-.34	.73	.2093
UKP	156	27.75	34.80	30.9760
KMA	156	3.00	6.00	3.4103
SGR	156	-54.60	6742.92	76.0618
FOW	156	.01	96.46	27.8033
IFRS	156	.63	1.00	.8704
Valid	N 156			
(listwise)				

Tabel 1 diatas merupakan hasil perhitungan dari nilai rata-rata, median, maksimum, minimum dan standar deviasi dari 156 objek penelitian. Perhitungan diatas menggunakan IBM SPSS 25 yang akan dijelaskan sebagai berikut:

1. Variabel dependen penghindaran pajak (CETR) memiliki nilai rata-rata sebesar 0,2093 yang menyatakan bahwa penghindaran pajak pada perusahaan yang terdaftar dalam indeks Kompas 100 yaitu sebesar 20,93% dari 52 perusahaan yang telah diteliti. Hal tersebut menunjukkan bahwa tingkat penghindaran pajak pada perusahaan yang terdaftar pada indeks Kompas 100 sangat rendah. Nilai minimum dari CETR sebesar -0,34 dan nilai maksimum sebesar 0,73 dengan standar deviasi sebesar 0,15007.
2. Variabel independen ukuran perusahaan (UKP) memiliki nilai rata-rata sebesar 30,9760 dengan standar deviasi sebesar 1,55608, hal ini menunjukkan bahwa nilai rata-rata lebih besar daripada standar deviasi artinya tingkat ukuran perusahaan yang terdaftar pada indeks Kompas 100 cukup tinggi. Nilai minimum dari UKP sebesar 27,75 dan nilai maksimum sebesar 34,80 dengan standar deviasi sebesar 1,55608.
3. Variabel independen komite audit (KMA) memiliki nilai rata-rata sebesar 3,4103, hal ini menunjukkan bahwa perusahaan yang terdaftar dalam indek Kompas 100 sudah memenuhi standar

yang telah ditetapkan. Nilai minimum sebesar 3,00 dan nilai maksimum sebesar 6,00, dengan standar deviasi sebesar 0,75239.

4. Variabel independen pertumbuhan penjualan (SGR) memiliki nilai rata-rata sebesar 76,0618, hal ini menunjukkan bahwa pertumbuhan penjualan pada perusahaan yang terdaftar dalam indeks Kompas 100 cukup tinggi. Nilai minimum sebesar -54,60 dan nilai maksimum sebesar 6742,92 dengan standar deviasi sebesar 572,80207.
5. Variabel independen kepemilikan asing (FOW) memiliki nilai rata-rata sebesar 27,8033, hal ini menunjukkan bahwa kepemilikan asing pada perusahaan yang terdaftar dalam indeks Kompas 100 jika dirata-rata dari 156 data penelitian bahwa sebesar 27% saham yang dimiliki oleh asing. Nilai minimum sebesar 0,01 dan nilai maksimum sebesar 96,46 dengan standar deviasi 31,15674.
6. Variabel moderasi tingkat implementasi IFRS (IFRS) memiliki nilai rata-rata sebesar 0,8704, hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar perusahaan yang terdaftar dalam indeks Kompas 100 sudah menerapkan tingkat implementasi IFRS terbaru. Nilai minimum sebesar 0,63 dan nilai maksimum sebesar 1,00 dengan standar deviasi sebesar 0,9463.

2. Uji Asumsi Klasik

Uji ini dilakukan untuk mengetahui kelayakan data, sehingga data yang akan diuji telah memenuhi syarat sebagai data valid, serta untuk mengetahui apakah variabel moderasi dapat memperkuat atau memperlemah pengaruh variabel

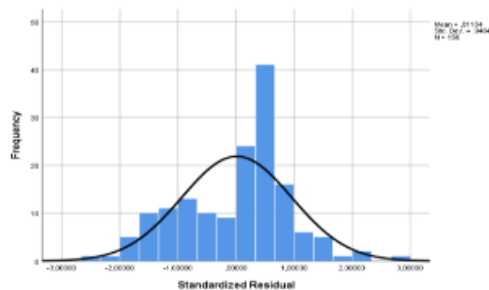
independen dengan variabel dependen. Pengujian asumsi klasik terdiri dari uji

normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas, dan uji autokorelasi.

- Uji Normalitas

Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui apakah data yang terdapat dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual berdistribusi dengan normal atau tidak. Model regresi dikatakan baik apabila data dalam penelitian berdistribusi secara normal atau mendekati normal. Dikatakan normal apabila garis chart berada di tengah-tengah antara daerah keragu ragan.

Gambar 1 Uji Normalitas Histogram



Sumber: Data yang telah diolah

Berdasarkan gambar 4.1 diatas merupakan hasil histogram yang menunjukkan bahwa garis chart berada ditengah-tengah antara daerah keragu-ragan. sehingga dapat disimpulkan bahwa data berdistribusi secara normal serta variabel pengganggu atau residual dapat dikatakan berdistribusi secara normal. Nilai standar deviasi sebesar 0,94843, menunjukkan nilai yang baik pada data penelitian.

- Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen.

Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel independen. Jika variabel independen saling berkorelasi, maka variabel-variabel ini tidak orthogonal. Variabel orthogonal adalah variabel independen yang nilai korelasi antar sesama variabel independen sama dengan nol. Kriteria dalam multikolinearitas dapat dilihat melalui nilai *Tolerance* dan *Variance Inflation Factor* (VIF). Jika nilai *Tolerance* $\leq 0,10$ dan nilai *VIF* ≥ 10 maka dapat disimpulkan bahwa setiap variabel terdapat multikolinearitas, sedangkan jika nilai *Tolerance* $\geq 0,10$ dan *VIF* ≤ 10 maka dapat disimpulkan bahwa setiap variabel tidak terdapat multikolinearitas.

Tabel 2 Hasil Uji Multikolinearitas

Coefficientsa

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
UKP	,683	1,463
KMA	,798	1,254
SGR	,929	1,076
FOW	,843	1,186
IFRS	,946	1,057

Dependent Variable: CETR

Sumber: data sekunder yang telah diolah

Berdasarkan tabel 4.3 menunjukkan bahwa nilai *Tolerance* pada semua variabel menunjukkan nilai ≥ 10 dan *VIF* menunjukkan nilai ≤ 10 . Dapat disimpulkan bahwa dari model regresi tidak terdapat multikolineritas pada setiap variabel.

• **Uji Heteroskedastisitas**

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah residual satu pengamatan ke pengamatan lainnya terjadi ketidaksamaan varians dalam model regresi. Kriteria model regresi yang baik adalah homoskedastisitas atau tidak terjadinya heteroskedastisitas. Dalam

penelitian ini, uji heteroskedastisitas menggunakan uji White. Kriteria pengujian dapat dilihat pada nilai sig, apabila nilai *c2* hitung $<$ nilai *c2*tabel, berarti tidak adanya heteroskedastisitas dalam model regresi. Apabila nilai *c2* hitung $>$ nilai *c2*tabel, berarti ada heteroskedastisitas pada model regresi. Berikut ini adalah hasil uji statistik White.

Tabel 3 Hasil Uji White

Pada tabel 4.4 menunjukkan hasil uji heteroskedastisitas dengan menggunakan uji (nilai R Square dikurangi 151) sebesar 7.55 dengan nilai *c2* tabel sebesar 180,6756 yang artinya tidak ada heteroskedastisitas dalam model regresi pada penelitian ini.

• **Uji Autokorelasi X-Y**

Uji autokorelasi ini bertujuan untuk menguji apakah antar residual (variabel pengganggu) yang berdasarkan waktu dalam suatu model regresi terdapat adanya autokorelasi. Kriteria model regresi yang baik adalah tidak adanya autokorelasi. Jika Terjadi korelasi, maka dinamakan ada problem autokorelasi. Pada pengujian ini peneliti menggunakan uji Durbin-Watson (DW), dimana uji Durbin-Watson ini mensyaratkan adanya konstanta dalam model regresi dan tidak ada variabel LAG diantara variabel independen. Syarat kriteria pengujian Durbin-Watson adalah $du < d < 4-du$. Berikut adalah hasil pengujian autokorelasi menggunakan Durbin-Watson.

Tabel 4 Hasil Uji Autokorelasi

Model Summaryb

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,275 ^a	,076	,051	,11622	1,975

a. Predictors: (Constant), FOW, KMA, SGR, UKP
b. Dependent Variable: absUI

Berdasarkan tabel 4.5 menunjukkan bahwa dari pengujian Durbin-Watson dengan pengobatan Cochane Orcut tersebut erdapat hasil nilai hitung sebesar 1,975. Nilai du pada tabel DW dengan K4 dan N 156 bernilai 1,7911, sehingga peneliti dapat menyimpulkan bahwa $1,7911 < 1,975 < 2.2009$ sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi tidak Terjadi masalah autokorelasi.

- Uji Autokorelasi X-Y-Z

Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui apakah ada autokorelasi jika variabel moderasi diuji secara bersama-sama. Berikut ini adalah hasil dari autokorelasi x-y-z.

Tabel 5 Hasil Uji Autokorelasi

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.337 ^a	.114	.084	.13653

a. Predictors: (Constant), IFRS, FOW, KMA, SGR, UKP

b. Dependent Variable: CETR

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.282 ^a	.079	.048	.11640	2.003

a. Predictors: (Constant), IFRS, FOW, KMA, SGR, UKP

b. Dependent Variable: CETR

Sumber: data sekunder yang telah diolah

Berdasarkan tabel 5 menunjukkan bahwa nilai Durbin-Watson dengan pengobatan Cochane Orcut terdapat hasil nilai hitung sebesar 2.003. Nilai du pada tabel DW dengan K4 dan N 156 bernilai 1,7911, sehingga peneliti dapat menyimpulkan bahwa $1,7911 < 2,003 < 2,2009$ yang artinya jika variabel Z (tingkat implementasi IFRS) diuji secara bersama-sama dengan variabel independen terhadap variabel dependen tidak terjadi autokorelasi. Berdasarkan hasil penelitian

dapat disimpulkan bahwa semua data yaitu variabel independen dan variabel moderasi merupakan model regresi yang baik.

3. Uji Hipotesis

Uji hipotesis pada penelitian ini menggunakan regresi linier berganda untuk menguji pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Variabel independen yang digunakan pada penelitian ini adalah ukuran perusahaan (UKP), komite audit (KMA), pertumbuhan penjualan (SGR), dan kepemilikan asing (FOW), sedangkan variabel dependen yang digunakan pada penelitian ini adalah penghindaran pajak (CETR).

- Analisis Regresi Linier Berganda

Uji regresi linier berganda ini menggunakan IBM SPSS 25. Rumus regresi linier berganda adalah sebagai berikut: $CETR = \beta_0 + \beta_1 UKP + \beta_2 KMA + \beta_3 SGR + \beta_4 FOW + e$

Hasil tersebut digunakan untuk melihat dan mengetahui pengaruh dari masing-masing variabel independen terhadap variabel independen dengan melihat nilai koefisien beta (β).

Tabel 6 Hasil Analisis Regresi Linear Berganda

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error			
1	(Constant)	-.029	.253		
	UKP	.002	.009	.019	.207
	KMA	.055	.018	.278	.3115
	SGR	-.013	.000	-.042	-.361
	FOW	.000	.000	-.051	-.609

a. Dependent Variable: CETR

Sumber: data sekunder yang telah diolah

Hasil dari tabel 6 menunjukkan hasil uji

regresi linier berganda tersebut dapat diperoleh persamaan sebagai berikut:

1. Constanta bernilai menunjukkan apabila penghindaran pajak, ukuran perusahaan, komite audit, pertumbuhan penjualan, dan kepemilikan asing konstan. Maka akan diperoleh penghindaran pajak sebesar 0,0155.
2. Variabel ukuran perusahaan menunjukkan nilai 0,002 yang berarti jika ukuran perusahaan naik 1 persen maka akan mengakibatkan penambahan nilai terhadap penghindaran pajak sebesar 0,002 dan sebaliknya jika ukuran perusahaan turun 1 satuan maka akan ada penurunan nilai terhadap penghindaran pajak sebesar (-0,002).
3. Variabel komite audit menunjukkan nilai 0,055 yang berarti jika komite audit naik 1 persen maka akan mengakibatkan penambahan nilai terhadap penghindaran pajak sebesar 0,055 dan sebaliknya jika ukuran perusahaan turun 1 satuan maka akan ada penurunan nilai terhadap penghindaran pajak sebesar (-0,055).
4. Variabel pertumbuhan penjualan menunjukkan nilai -0,013 yang berarti jika pertumbuhan penjualan naik 1 persen maka akan mengakibatkan penurunan terhadap penghindaran pajak sebesar 0,013 atau 1,3% dengan faktor lain dianggap konstan.
5. Variabel kepemilikan asing menunjukkan nilai 0,000 yang berarti jika ukuran perusahaan naik 1 persen maka akan mengakibatkan nilai kepemilikan asing tetap yaitu 0,000 terhadap penghindaran pajak dengan faktor lain dianggap konstan.

• **Uji Moderated Regression Analysis (MRA)**

Uji MRA ini menggunakan pendekatan analitik yang mempertahankan keutuhan sampel serta mengontrol pengaruh variabel moderasi. Berikut adalah rumus dari MRA:

$$CETR = \beta_0 + \beta_1UKP + \beta_2KMA + \beta_3SGR + \beta_4FOW + \beta_5UKP*IFRS + \beta_6KMA*IFRS + \beta_7SGR*IFRS + \beta_8FOW*IFRS + e$$

Pengujian MRA ini menggunakan IBM SPSS 25 dengan model pure moderator adalah sebagai berikut:

Tabel 7 Hasil Analisis Regresi Moderasi

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients			
	B	Std. Error	Beta	T	Sig.	
1	(Constant)	-.212	.253		-.839	.403
	UKP	.022	.020	.225	1.101	.273
	KMA	-.191	.137	-.958	-1.393	.166
	SGR	.000	.000	.605	.615	.539
	FOW	.003	.004	.538	.578	.564
	UKP_I FRS	-.016	.019	-.333	-.875	.383
	KMA_I FRS	.266	.158	1.336	1.817	.071
	SGR_I FRS	.000	.000	-.743	-.756	.451
	FOW_I FRS	-.003	.005	-.588	-.635	.527

a. Dependent Variable: CETR

Sumber: data sekunder yang telah diolah

Berdasarkan tabel 7 menunjukkan persamaan MRA sebagai berikut:

$$CETR = (-0,212) + 0,022UKP + (-0,191)KMA + 0,000SGR + 0,003FOW + (-0,16)UKP*IFRS + 0,286KMA*IFRS + 0,000SGR*IFRS + (-,003) FOW*IFRS + e$$

Dari persamaan tersebut dapat tarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Hasil perhitungan pengaruh variabel moderasi tingkat implementasi IFRS pada hubungan ukuran perusahaan terhadap

penghindaran pajak ($\beta 5UKP*IFRS$) diperoleh nilai sig sebesar 0,383 dengan tingkat signifikan sebesar 0,05. Dari nilai tersebut dapat disimpulkan bahwa tingkat implementasi IFRS tidak dapat mempengaruhi (memperlemah atau memperkuat) hubungan variabel ukuran perusahaan terhadap variabel penghindaran pajak.

2. Hasil perhitungan pengaruh variabel moderasi tingkat implementasi IFRS pada hubungan komite audit terhadap penghindaran pajak ($\beta 6KMA*IFRS$) diperoleh nilai sig sebesar 0,071 dengan tingkat signifikan sebesar 0,05. Dari nilai tersebut dapat disimpulkan bahwa tingkat implementasi IFRS tidak dapat mempengaruhi (memperlemah atau memperkuat) hubungan variabel ukuran perusahaan terhadap variabel penghindaran pajak.

3. Hasil perhitungan pengaruh variabel moderasi tingkat implementasi IFRS pada hubungan pertumbuhan penjualan terhadap penghindaran pajak ($\beta 7SGR*IFRS$) diperoleh nilai sig sebesar 0,451 dengan tingkat signifikan sebesar 0,05. Dari nilai tersebut dapat disimpulkan bahwa tingkat implementasi IFRS tidak dapat mempengaruhi (memperlemah atau memperkuat) hubungan variabel ukuran perusahaan terhadap variabel penghindaran pajak.

4. Hasil perhitungan pengaruh variabel moderasi tingkat implementasi IFRS pada hubungan kepemilikan asing terhadap penghindaran pajak ($\beta 8FOW*IFRS$) diperoleh nilai sig sebesar 0,527 dengan tingkat signifikan sebesar 0,05. Dari nilai tersebut dapat disimpulkan bahwa tingkat implementasi IFRS tidak dapat mempengaruhi (memperlemah atau memperkuat) hubungan variabel ukuran perusahaan terhadap variabel penghindaran pajak.

4. Uji Koefisien Determinasi (R²)

- Uji Koefisien Determinasi (R²) X-Y

Uji koefisien determinasi (R²) bertujuan untuk mengetahui berapa besar persentase kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen. Nilai (R²) memiliki nilai 0 sampai dengan 1, besar kecilnya nilai (R²) menunjukkan tingkat kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen. Berikut ini adalah hasil dari uji determinasi (R²):

Tabel 8 Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model Summary ^a				
Model	R	Adjusted R Square	R Square	Std. Error of the Estimate
1	.299 ^a	.090	.065	.14509

a. Predictors: (Constant), UKP, KMA, SGR, FOW

b. Dependent Variable: CETR

Sumber: data sekunder yang telah diolah

Tabel 9 Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model Summary ^a				
Model	R	Adjusted R Square	R Square	Std. Error of the Estimate
1	.402 ^a	.161	.133	.13971

a. Predictors: (Constant), IFRS, UKP, KMA, SGR, FOW

b. Dependent Variable: CETR

Sumber: data sekunder yang telah diolah

Berdasarkan hasil uji determinasi diatas, dapat dilihat pada kolom Adjusted R Square sebesar 0,133. Hasil tersebut menunjukkan bahwa sebesar 13,3% variabel independen dengan variabel moderasi dapat mempengaruhi variabel dependen. Dan sisanya sebesar 86,7% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak ditulis pada penelitian ini.

- Simpulan Determinasi (R²)

Dari kedua penelitian uji koefisien determinasi (R²) dalam bentuk tabel yang telah dipaparkan diatas dapat disimpulkan bahwa hasil R² pada uji X-Y memperoleh

hasil sebesar 6,5% sedangkan hasil R2 pada uji X-Z-Y memperoleh hasil sebesar 13,3%. Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel independen (X) dapat mempengaruhi variabel dependen (Y) sebesar 6,5% dan sisanya dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak ditulis pada penelitian ini, ketika variabel moderasi (Z) dimasukkan kedalam pengujian maka hasil berubah menjadi 13,3%. Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel moderasi (Z) lebih kuat dalam mempengaruhi variabel dependen (Y).

5. Uji Statistik F

Uji ini digunakan untuk mengetahui apakah semua variabel independen secara serentak dapat mempengaruhi variabel dependen secara signifikan. Nilai uji statistik F dilihat dari nilai signifikansi dan nilai F pada tabel uji ANOVA. Jika nilai sig < tingkat sig 0,05 dan nilai F hitung > dari F tabel, jika syarat tersebut terpenuhi maka secara serentak variabel independen berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen.

Tabel 10 Hasil Uji Statistik F ANOVA

Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.	
1	Regresion	.313	4	.078	3.71	.006 ^a
	Residual	3.178	151	.021	5	
	Total	3.491	155			

a. Dependent Variable: CETR

b. Predictors: (Constant), UKP, KMA, SGR, FOW

Sumber: data sekunder yang telah diolah

Berdasarkan hasil pada tabel 4.11 diatas menunjukkan bahwa nilai sig adalah 0,006 dan nilai F hitung sebesar 3,715. Sehingga dapat disimpulkan bahwa nilai sig < 0,05 dan F hitung > 2,43 (F tabel) yang berarti variabel ukuran perusahaan, komite audit, pertumbuhan penjualan, dan kepemilikan asing secara simultan

mempengaruhi terhadap variabel penghindaran pajak.

6. Uji Statistik t

Uji ini digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen secara individual dapat mempengaruhi secara signifikan terhadap variabel independen. Pada uji t ini dilihat pada nilai t hitung pada tabel pengujian hasil regresi yang didapat. Tingkat signifikansi yang digunakan adalah 5% (0,05) dan membandingkan antara t hitung dengan t tabel, apabila nilai sig < 0,05 dan t hitung > dari t tabel serta -t hitung < -t tabel maka dapat disimpulkan bahwa H1 diterima dan H0 ditolak.

Tabel 11 Hasil Uji Statistik t

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		Sig.	
	B	Std. Error	Beta	t		
1	(Constant)	-.029	.253		-.114	.909
	UKP	.002	.009	.019	.207	.837
	KMA	.055	.018	.278	3.115	.002
	SGR	-.013	.000	-.042	-2.361	.046
	FOW	.000	.000	-.061	-.608	.544

a. Dependent Variable: CETR

Sumber: data sekunder yang telah diolah

Berdasarkan tabel 4.12 diatas menunjukkan hasil dari uji t pada penelitian ini, hasil penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pengaruh ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak

Nilai t hitung pada variabel ukuran perusahaan (UKP) adalah 0,207 dan nilai signifikansi sebesar 0,837. Hal ini dapat dilihat bahwa nilai t hitung < dari nilai t tabel yaitu 1,9758 dengan signifikansi 0,05 (5%) yang berarti variabel ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak, maka H0 diterima H1

ditolak.

2. Pengaruh komite audit terhadap penghindaran pajak Nilai t hitung pada variabel ukuran komite audit (KMA) adalah 3115 dan nilai signifikansi sebesar 0,002. Hal ini dapat dilihat bahwa nilai t hitung $>$ dari nilai t tabel yaitu 1,9758 dengan signifikansi 0,05 (5%) yang berarti variabel komite audit berpengaruh terhadap penghindaran pajak, maka H_0 ditolak H_1 diterima.

3. Pengaruh pertumbuhan penjualan terhadap penghindaran pajak Nilai t hitung pada variabel pertumbuhan penjualan (SGR) adalah -2361, dan nilai signifikansi sebesar 0,046. Hal ini dapat dilihat bahwa nilai t hitung $<$ dari nilai t tabel yaitu (-1,9758) dengan signifikansi 0,05 (5%) yang berarti variabel pertumbuhan penjualan berpengaruh terhadap penghindaran pajak, maka H_0 ditolak H_1 diterima.

4. Pengaruh kepemilikan asing terhadap penghindaran pajak Nilai t hitung pada variabel ukuran komite audit (KMA) adalah -0,609 dan nilai signifikansi sebesar 0,544. Hal ini dapat dilihat bahwa nilai t hitung $>$ dari nilai t tabel yaitu (-1,9758) dengan signifikansi 0,05 (5%) yang berarti variabel kepemilikan asing tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak, maka H_0 diterima H_1 ditolak

IV. SIMPULAN

Simpulan dari penelitian ini adalah:

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh ukuran perusahaan, komite audit, pertumbuhan penjualan, dan kepemilikan asing terhadap penghindaran pajak dengan tingkat implementasi IFRS sebagai moderasi. Variabel ukuran perusahaan diukur dengan menggunakan logaritma natural (Ln) atas jumlah asset. Komite audit diukur dengan menggunakan

jumlah total komite audit dalam sebuah perusahaan. Pertumbuhan penjualan diukur dengan menggunakan jumlah penjualan tahun ini dikurang penjualan tahun sebelumnya lalu dibagi penjualan tahun lalu. Kepemilikan asing dihitung dengan menggunakan jumlah lembar saham yang dimiliki oleh asing dibagi dengan jumlah lembar saham yang beredar lalu dikali 100%. Tingkat implementasi IFRS diukur dengan menggunakan variabel dummy berdasarkan ketentuan IFRS terbaru. Penghindaran pajak diukur dengan menggunakan rumus cash effective tax rate (CETR), yaitu pajak yang dibayarkan oleh perusahaan dibagi dengan laba sebelum pajak.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka diperoleh kesimpulan dari analisis data sebagai berikut:

1. Ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Hal ini disebabkan karena perusahaan akan cenderung mentaati ketentuan perpajakan yang telah diatur, perusahaan akan menghindari pemeriksaan pajak yang rumit dan segala sanksi yang diberikan jika perusahaan tersebut melakukan pelanggaran tersebut serta akan membuat citra perusahaan menjadi tidak baik. Besar kecilnya perusahaan tidak berpengaruh terhadap pembayaran pajak, karena pembayaran pajak merupakan kewajiban setiap wajib pajak.
2. Komite audit berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Hal ini disebabkan karena komite audit merupakan salah satu alat yang mampu mengawasi dan membuat meningkatnya kualitas pengungkapan perusahaan. Komite audit diharap dapat memberikan pandangannya terhadap masalah-masalah yang dihadapi oleh

- perusahaan. Semakin banyak komite audit dalam sebuah perusahaan maka semakin banyak pendapat dan ide-ide yang diberikan oleh anggota komite audit, serta semakin banyak komite audit akan menyebabkan tingkat perselisihan karena perbedaan pendapatan semakin tinggi. Sebaliknya, jika jumlah komite audit sedikit maka pendapat dan ide-ide yang diberikan oleh anggota hanya sedikit, tetapi semakin rendah tingkat perselisihan karena perbedaan pendapatan antar anggota dapat diminimalkan. Jika laporan keuangan perusahaan tidak terjadi pelanggaran, artinya kinerja komite audit berjalan dengan baik.
3. Pertumbuhan penjualan berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Pada penelitian ini menghasilkan pengaruh negatif karena data penelitian menunjukkan lebih dominan besarnya penjualan pada tahun sebelumnya. Semakin tinggi pertumbuhan penjualan akan menurunkan penghindaran pajak. Pertumbuhan penjualan yang tinggi menunjukkan bahwa kinerja yang telah dilakukan perusahaan adalah baik, dengan tingginya pertumbuhan penjualan maka akan meningkatkan laba perusahaan. Semakin tinggi laba perusahaan. Sehingga cenderung manajemen untuk melakukan penghindaran pajak untuk meminimalkan jumlah pajak yang dibayarkan.
 4. Kepemilikan asing tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Hal ini disebabkan karena jumlah besar kecilnya kepemilikan asing tidak mempengaruhi penghindaran pajak. Jumlah kepemilikan asing hanya menandakan berapa banyak jumlah saham yang dimiliki oleh asing.
- Banyaknya jumlah kepemilikan asing menandakan keberhasilan perusahaan.
5. Tingkat implementasi IFRS tidak mampu memoderasi (memperkuat atau memperlemah) hubungan ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak.
 6. Tingkat implementasi IFRS tidak mampu memoderasi (memperkuat atau memperlemah) hubungan komite audit terhadap penghindaran pajak.
 7. Tingkat implementasi IFRS tidak mampu memoderasi (memperkuat atau memperlemah) hubungan pertumbuhan penjualan terhadap penghindaran pajak.
 8. Tingkat implementasi IFRS tidak mampu memoderasi (memperkuat atau memperlemah) hubungan kepemilikan asing terhadap penghindaran pajak.
- Keterbatasan Penelitian
 1. Keterbatasan fasilitas untuk melakukan penelitian ini dan perpustakaan nasional yang menjadi referensi untuk penelitian karena kebijakan PSBB yang diberlakukan.
 2. Laporan keuangan di IDX belum semuanya lengkap, jadi peneliti harus mencari laporan keuangan dari sumber lain seperti website perusahaan tersebut.
 - Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan pada penelitian ini, maka peneliti dapat memberi saran, yaitu:

 1. Bagi *Stakeholder*

Stakeholder harus memerhatikan kepentingan para pemegang saham, bukan mementingkan kepentingan

pribadi. Segala keputusan yang diambil stakeholder akan berpengaruh terhadap perusahaan dan pemegang saham. Jadi sebaiknya perusahaan tidak melakukan penghindaran pajak.

2. Bagi Investor

Investor diharapkan menginvestasikan dananya kepada perusahaan yang mempunyai kinerja yang baik. Tentunya investor sebaiknya tidak hanya melihat dari segi laporan keuangan, tetapi dapat melihat dari segi manajemen.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

- a. Peneliti selanjutnya diharapkan lebih membaca banyak jurnal untuk pemilihan variabel yang akan digunakan pada penelitian.
- b. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat melakukan penelitian pada perusahaan dengan periode yang lebih dari 3 tahun.
- c. Peneliti selanjutnya diharapkan dapat meneruskan penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya.
- d. Peneliti selanjutnya diharapkan memilih variabel yang lebih banyak hasilnya berpengaruh antara variabel x dan y .

DAFTAR RUJUKAN

Ahalik, Ety Murwaningsari, Sekar Mayangsari, dan Titik Aryati. (2019). *The Development Of IFRS Implementation Index and Its Effect On Corporate Values In Indonesia In 2015*.

Bradbury, M. E., Mak, Y. T. dan Tan, S. M. 2004. "Board Characteristics, Audit Committee Characteristics and Abnormal Accruals". Working Paper. United New Zealand dan National University of Singapore.

Brigham, Eugene F. dan J. F. Houston. 2010. *Dasar-Dasar Manajemen Keuangan*. Edisi 11. Jakarta: Salemba Empat.

Brown, K. B. (2012). *A Comparative Look at Regulation of Corporate Tax Avoidance*. New York: Springer.

Budiman, J dan Setiyono 2012. Pengaruh Karakter Eksekutif Terhadap Penghindaran Pajak (Tax avoidance). Simposium Nasional Akuntansi XV, Banjarmasin.

Cahyono, Dedy Dyas, Rita Andini, dan Kharis Raharjo. (2016). Pengaruh Komite Audit, Kepemilikan Institusional, Dewan Komisaris, Ukuran Perusahaan, Leverage dan Profitabilitas Terhadap Tindakan Penghindaran Pajak.

Dayan, Anto. (1986). *Pengantar Metode Statistik II*. Jakarta: Penerbit LP3ES.

Deegan, Craig. 2014. *Financial Accounting Theory*. McGraw-Hill, Australia.

Dewinta, Ida Ayu Rosa, dan Putu Ery Setiawan. (2016). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Umur Perusahaan, Profitabilitas, Leverage dan Pertumbuhan Penjualan Terhadap Tax Avoidance.

Dharma, I Made Surya, dan Ardiana, Putu Agua. (2016). Pengaruh Leverage, Intensitas Aset Tetap, Ukuran Perusahaan, dan Koneksi Politik Terhadap Tax Avoidance.

Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER 03/PJ/2015 tentang Penyampaian Surat Pemberitahuan Elektronik.

Direktorat Jenderal Pajak, Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pajak.

Djarwanto, P. S. (1994). *Pokok-Pokok Analisa Laporan Keuangan*. Yogyakarta: BPFE, Cetakan I.

Eisenhardt, Kathleem. M. (1989). Agency Theory: An Assesment and Review. *Academy of Management Review*, 14.

Erly, Suandy. 2011. *Perencanaan Pajak*. Edisi 5. Jakarta: Salemba Empat.

Friana, Hendra. 2019. "DJP Dalam Dugaan Penghindaran Pajak PT Adaro Energy". [Online]. Diakses 02 Maret 2020 dari

- <https://tirto.id/djp-dalami-dugaan-penghindaran-pajak-pt-adaro-energy-edKk>.
- Ghozali, Imam. (2018). Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25. Bandung: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Ghozali, Imam dan Anis Chariri. (2007). Teori Akuntansi, Edisi 3, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hartono, Jogiyanto. 2008. Teori Portofolio dan Analisis Investasi. Edisi Kelima. BPF. Yogyakarta.
- Hasan, Iftekhar. Incheol Kim. Haimeng Teng. dan Qiang Wu. (2017). The Effect Of Foreign Institutional Ownership On Corporate Tax Avoidance: International Evidence.
- Hatta, Atika Jauhari. (2002). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kebijakan Dividen: Investigasi Pengaruh Teori Stakeholder.
- Irianto, Bambang Setyobudi. Yudha Aryo Sudibyo. dan Abim Wafirli. (2017). The Influence of Profitability, Leverage, Firm Size and Capital Intensity Towards Tax Avoidance.
- Jensen, Michael C. dan W.H. Meckling (1976) Theory of The Firm; Managerial Behavior, Agency Cost and Ownership Structure. *Journal of Financial Economics* 3. Hal 305-360.
- Kalbers, L. and P. T. Fogarty. "Professionalism and Its Consequences: A Study of Internal Auditors". *Journal of Auditing* 14, no.1 (Sarasota: Spring 1995).
- Kamir. (2012). Analisis Laporan Keuangan. Jakarta.: PT Raja Grafindo Persada.
- KBBI, 2016. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). [Online]. Diakses 12 Maret 2020 dari <https://kbbi.web.id/subjek>.
- Kesuma, Ali. (2009). Analisis Faktor yang Mempengaruhi Struktur Modal serta Pengaruhnya Terhadap Harga Saham Perusahaan Real Estate yang Go Public di BEI. *Jurnal Manajemen & Kewirausahaan*.
- Mahdiana, Maria Qibti. dan Muhammad Nuryatno Amin. (2020). Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Ukuran Perusahaan dan Sales Growth Terhadap Tax Avoidance.
- Mais, Rimi Gusliana. dan Dewi Patminingih. (2017). Effect of Good Corporate Governance On Tax Avoidance Of The Company Listed Of The Indonesia Stock Exchange (BEI).
- McLeod Pearson. (2008). Sistem Informasi Manajemen. Jakarta: Salemba.
- Oktamawati, Mayarisa. (2017). Pengaruh Karakteristik Eksekutif, Komite Audit, Ukuran Perusahaan, Leverage, Pertumbuhan Penjualan dan Profitabilitas Terhadap Tax Avoidance.
- Oktaviyani, Rusna. dan Agus Munandar. (2017). Effect Of Solvency, Sales Growth, and Institutional Ownership On Tax Avoidance With Profitability As Moderating Variables in Indonesian Property and Real Estate Companies.
- Pablo, Samuel. 2019. "JK: Ukuran Perusahaan Bukan Lagi Untung-Rugi, Tetapi Valuasi". [Online]. Diakses 02 Maret 2020 dari <https://www.cnbcindonesia.com/tech/20190415101045-37-66715/jkukuran-perusahaan-bukan-lagiuntung-rugi-tetapi-valuasi>.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55 / POJK.04 / 2015 Tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit
- Prakosa, Bambang. 2014. Pengaruh Profitabilitas, Kepemilikan Keluarga, dan Corporate Governance Terhadap Penghindaran Pajak di Indonesia. *Jurnal Simposium Nasional Akuntansi XVII*. Lombok. 2014.
- Pohan, Chairil Anwar. 2016. Manajemen Perpajakan Strategi Perencanaan Pajak dan Bisnis. Jakarta. PT Gramedia Pustaka Utama.
- Pohan, H.T. 2008. Pengaruh Good Corporate Governance, Rasio Tobin's q, Perata Laba Terhadap Penghindaran Pajak pada Perusahaan Publik.
- Priyatno, Dewi. (2008). Mandiri Belajar SPSS – Bagi Mahasiswa dan Umum. Yogyakarta: MediaKom.
- Rahmawati. 2006. "Pengaruh Asimetri Informasi terhadap Praktik Manajemen Laba pada Perusahaan Perbankan Publik yang terdaftar di Bursa Efek Jakarta". *Simposium Nasional Akuntansi IX*.
- Rakhmardi, Edmiriyanto Yusri. (2011). Kinerja Perusahaan Dengan Kepemilikan Asing dan Kepemilikan Institusional Dosmetik yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

- Resmi, S. 2004. *Perpajakan Teori dan Kasus*. Edisi Keempat. Penerbit Salemba Empat, Jakarta
- Refgia, Thesa. (2017). *Pengaruh Pajak, Mekanisme Bonus, Ukuran Perusahaan, Kepemilikan Asing, dan Tunneling Intensive Terhadap Transfer Pricing*.
- Sissandhy, Aldila Khairina. (2014). *Pengaruh Kepemilikan Asing Terhadap Nilai Perusahaan Dengan Corporate Social Responsibility Sebagai Variabel Intervening*.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*.
Bandung: Alfabeta, CV.
- Sukmana, Yoga. 2019. "6 Sektor Penyumbang Pajak Terbesar RI, Siapa yang Tertinggi? [Online]. Diakses 05 Maret 2020 dari <https://money.kompas.com/read/2019/08/03/144800626/6-sektor-penyumbang-pajak-terbesar-ri-siapa-yang-tertinggi-?page=all>.
- Supranto. (2000). *Metode Riset: Aplikasinya dalam Pemasaran*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Tiwa, Evan Maxentia. David P.E. Saerang. dan Victorina Z. Tirayoh. (2017). *Pengaruh Pajak dan Kepemilikan Asing Terhadap Penerapan Transfer Pricing pada Perusahaan Manufaktur*.
- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
- Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal.
- Waluyo, 2011. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.
- Watts, R. L. and Zimmerman.1986. *Positive Accounting Theory*, New York: Prentice-Hall.
- Wicaksono, Adhi. 2019. "Modal di Bursa Saham RI masih dikuasai Asing" [Online]. Diakses 02 Maret 2020 dari <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20190812181845-92-420664/modal-di-bursa-saham-rimasih-dikuasai-asing>.